

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN
MUZAKKI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH
NAHDATUL ULAMA PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**RIZKA FITRIA NOFITASARI
NPM : 1551030080**

**Program Studi : Ekonomi Syariah
(Konsentrasi Akuntansi Syariah)**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H /2020 M**

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI
PADA LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Pembimbing I : Erike Anggraeni, M.E.Sy.
Pembimbing II : Agus Kurniawan, M.S.Ak.

**FAKULTA EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441/2019 M**

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang terdiri dari Syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Zakat dapat diartikan juga sebagai ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta financial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu rukun islam. Dalam alqur'an kedudukan menuaikan zakat bersamaan dengan kewajiban menegakkan salat. Pengelolaan zakat di Indonesia yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 memaparkan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung. Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Transparansi dan Akuntabilitas pada laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat di Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama Provinsi Lampung. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan data primer dimana metode pengambilan data menggunakan metode kuesioner yang disebar di lingkup LAZISNU Provinsi Lampung. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) dan variabel dependennya adalah kepercayaan muzakki (Y). Metode sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, dan didapat sebanyak 41 responden. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis berganda. Hasil penelitian ini yaitu : 1) Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki, yang ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $4,414 > t_{tabel}$ sebesar 2,019 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. 2) Akuntabilitas Laporan Keuangan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan muzakki, yang ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $-0,225 < t_{tabel}$ sebesar 2,019 dan taraf signifikansi lebih dari 0,823 ($0,823 > 0,05$). 3) Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepercayaan Muzakki, yang dapat dilihat dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, dan $F_{hitung} 9,933 > F_{tabel} 3,23$.

Kata Kunci : Zakat, Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Muzakki



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. H. Endro Suratmih, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDATUL ULAMA DI PROVINSI LAMPUNG.**

Nama **Rizka Fitria Nofitasari**
NPM **1551030080**
Jurusan **Ekonomi Syariah**
Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyahkan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009

Agus Kurniawan, M.S.Ak.
NIP. 197504242002121001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jls. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul “PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKID DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDATUL ULAMA DI PROVINSI LAMPUNG”. Di susun

oleh **Rizka Fitria Nofitasari, NPM: 1551030080, Jurusan Ekonomi Syariah,**
Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 14**
Februari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr.H. Rubhan Masykur, M.Pd.

Sekretaris : Ulul Azmi Mustofa, M.S.I.

Penguji I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.

Penguji II : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

Motto

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ١٠٣

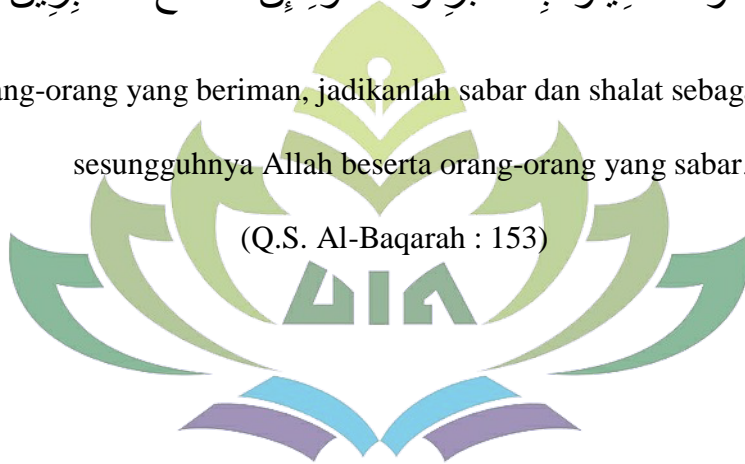
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka,...”

(Q.S. At-Taubah (9) : 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ١٥٣

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah : 153)

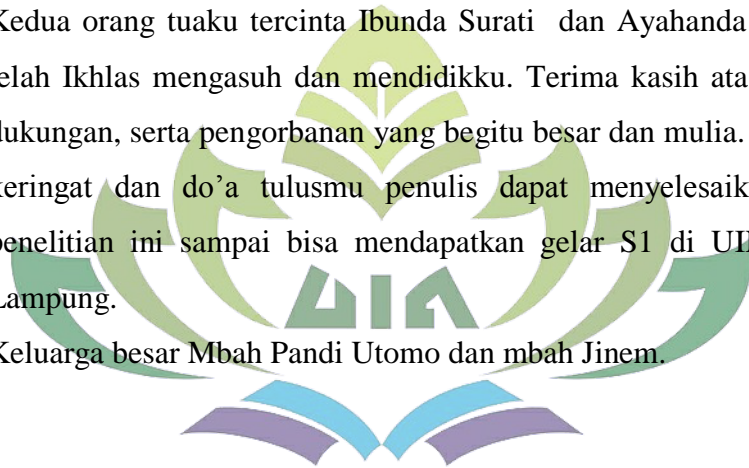


PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillahirabbil'alamin akhirnya setelah sekian banyak proses yang panjang yang penuh dengan drama serta lika-liku, berakhirlah penulis pada titik pencapaian yang sungguh luar biasa ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan dan do'a dari orang-orang yang sangat kusayangi dan yang menyayangiku. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibunda Surati dan Ayahanda Fahrizal yang telah Ikhlas mengasuh dan mendidikku. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang begitu besar dan mulia. Berkat cucuran keringat dan do'a tulusmu penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini sampai bisa mendapatkan gelar S1 di UIN Raden Intan Lampung.
2. Keluarga besar Mbah Pandi Utomo dan mbah Jinem.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung”. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah menjadi suri teladan bagi seluruh umat Islam di dunia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan sebaik-baiknya, namun di sisi lain penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tak lupa menghaturkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah mengayomi penulis dan memberikan izin serta kemudahan kepada penulis dalam proses penelitian skripsi.
2. Madnasir, S.E, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Any Eliza, M.S.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Erike Anggraini, M.E.Sy., selaku pembimbing 1 dan bapak Agus Kurniawan, M.S.Ak., selaku pembimbing 2, yang telah banyak meluangkan waktunya selama ini membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga berkah ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini menjadi amal jariyah untuk bapak dan ibu pembimbing.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak motivasi positif, ilmu yang bermanfaat serta menyediakan berbagai referensi buku pada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
7. Keluarga besar mbah Pandi Utomo, nenek Jinem, pakde, bude, oom, bibi, dan sepupu-sepupu tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang, do'a, dan supportnya yang telah diberikan selama ini sampai rizka bisa menyelesaikan study sampai S1 ini.
8. Sahabat-sahabatku Yuniar Sari, Yenita Fitriana, Sella Yunita, Mia Rosmiana, Iin Herawati, Lela Pipit Fitrian, Muhammad Dzaky Ardi Nugroho, Nurul Aprinita, Wahyu Perdana, yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penelitian dan pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas persahabatannya selama ini. Dan untuk Edi Sudrajat teman seperjuanganku dalam berkelana mencari objek penelitian, semoga semua langkah kita menjadi berkah dan lelah ini menjadi lillah.

9. Terimakasih juga untuk mas Mirham Yulianto, Noviani Citra Dewi, Nova Yosicha Andriani dan mas Ogi Saputra yang senantiasa memberi bantuan, semangat dan menghibur penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2015, terkhusus Akuntansi Syariah C terimakasih atas persahabatan dan kebersamaanya selama ini.
11. Teman-teman KKN kelompok 95 dusun Sukamulya desa Sukanegara kecamatan Tanjung Bintang 2018 terimakasih telah menjadi bagian dari cerita dan pengalaman di hidup.
12. Bapak Ibu staf di PLN Rayon Way Halim yaitu kantor tempat sang penulis melaksanakan magang kerja per Oktober 2018, terimakasih atas semua bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
13. Saudara-saudara PSHT komisariat UIN RIL, PSHT Cabang Bandar Lampung dan PSHT Cabang Lampung Selatan, serta sahabat-sahabat adik-adik keluarga UKM KOPMA UIN RIL.
14. LAZISNU Provinsi Lampung yang telah berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
15. Serta semua pihak yang telah banyak membantu, memberikan support dan motivasinya kepada saya, maaf tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungannya dan semoga kita selalu terjalin dalam ukhuwah islamiyah kita bersama.

Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis,

Rizka Fitria Nofitasari

1551030080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Grand theory</i>	
1. Teori keagenan (<i>agency teori</i>)	13
B. Tinjauan Tentang Zakat	
1. Definisi Zakat	16
2. Dasar Hukum Zakat	17
3. Syarat dan wajib zakat	18
4. Infak dan Sedekah	22
C. Definisi Transparansi	23
D. Definisi Akuntabilitas	27
E. Laporan keuangan	30
F. Kepercayaan Muzakki	36
G. Akuntansi zakat	38
H. Organisasi Pengelolaan Zakat	43
I. Penelitian Terdahulu	45
J. Kerangka Berpikir	49
K. Hipotesis	
1. Pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan muzakki	51
2. Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan muzakki	52

3. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan muzakki	53
--	----

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian	54
B. Jenis Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel Penelitian	54
1. Populasi	54
2. Sampel	55
D. Sumber Data	56
1. Data Primer	56
2. Data Sekunder	57
E. Definisi Operasional Penelitian	58
1. Variabel Independen	58
2. Variabel Dependen	58
F. Metode Pengumpulan Data	60
1. Metode Wawancara	60
2. Metode Dokumentasi	61
G. Teknik Analisis Data	61
1. Metode Analisis Data	62
2. Uji Asumsi Klasik	63
3. Uji Hipotesis	66
4. Koefisiensi Determinasi	67
5. Analisis Regresi Berganda	69

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	71
1. Kondisi Internal	71
2. Kondisi Eksternal	72
3. Visi Misi LAZIZNU Provinsi Lampung	72
4. Struktur Kepengurusan	73
5. Legalitas Lembaga	74
6. Metode berzakatdi LAZIZNU	74
7. Layanan Jemput Zakat	75
8. Sistem aplikasi muzakki dan mustahik	75
B. Data karakteristik responden	75
1. Responden berdasarkan jenis kelamin	76
2. Responden berdasarkan usia	76
3. Responden berdasarkan pekerjaan	77
C. Hasil Uji Data	78
1. Uji Validitas	78
2. Uji reabilitas	79
D. Uji Asumsi Klasik	79
1. Uji Normalitas	79
2. Uji Multikolineritas	80

3.	Uji Heteroskidastisitas	81
E.	Analisis Regresi linier berganda	82
F.	Uji Hipotesis	83
1.	Uji Parsial	83
2.	Uji simultan	84
3.	Uji koefisiensi Determinasi (Adjusted R ²).....	85
G.	Pembahasan	86
1.	Pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan muzakki	86
2.	Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan muzakki	90
3.	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan muzakki	94

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	96
B.	Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Pengumpulan ZIS pada tahun 2016/2017	8
1.2 Data Penghimpunan ZIS pada tahun 2016-2018	9
3.1 Tabel Definisi Operasional	58
3.2 Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi	69
4.1 Analisis tingkat pengembalian kuesioner	75
4.2 Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin	76
4.3 responden berdasarkan usia	76
4.4 responden berdasarkan pekerjaan	77
4.5 Uji Validitas	78
4.6 Uji Reliabel	79
4.7 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	80
4.8 Hasil Estimasi Uji Multikolinearitas	81
4.9 Hasil Uji Glejser	82
4.7 Hasil uji analisis regresi berganda	82
4.8 hasil uji parsial	83
4.9 uji F (simultan)	85
4.10 Determinasi (Adjusted R ²)	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Adapun judul skripsi ini adalah **“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung ”**. Dari judul skripsi tersebut maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari

sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2. Transparansi

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Menurut Mardiasmo transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

3. Akuntabilitas

Dalam bidang Ilmu Akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjelasan. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Istilah akuntabilitas dalam bidang ilmu akuntansi dipisahkan dengan istilah responsibilitas atau diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak “pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban”.

¹ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), h. 849

4. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Dalam pengertian yang sederhana, Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan atau lembaga pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.²

5. Kepercayaan Muzakki

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menenuaikan zakat. Kepercayaan muzakki dapat diartikan sebagai bentuk penilaian dan pengetahuan muzakki mengenai apa yang telah diberikan oleh lembaga pengelolaan zakat kepada muzakki sehingga muzakki dapat merasakan manfaatnya.

B. Alasan Memilih Judul

Setiap penelitian tentu ada alasan yang dijadikan acuan dalam memilih judul penelitian. Adapun alasan penulis judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Adapun alasan penulis menentukan judul ini adalah untuk mengetahui apakah Transparansi dan Akuntabilitas pada laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat di Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.

² Drs. Sofyan Syarif Harahap, MS Ac, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h.7

2. Alasan Subjektif

- a. Penulis melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini masih banyak masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri tanpa melalui badan amil zakat yang sudah didirikan oleh pemerintah. Padahal akan jauh lebih efektif apabila zakat disalurkan pada lembaga zakat ataupun badan amil zakat.
- b. Banyaknya referensi ataupun penelitian terdahulu yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

C. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang terdiri dari Syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Zakat dapat diartikan juga sebagai ibadah dijalan Allah yang berbentuk harta financial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu rukun islam.³ Dalam alqur'an kedudukan menuaikan zakat bersamaan dengan kewajiban menegakkan salat. Zakat merupakan ibadah berdimensi horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kesetaraan tersebut mengartikan zakat sangat mendasar dan fundamental bagi agama islam. Zakat dapat dijadikan sebagai bukti nyata kepedulian umat islam terhadap golongan

³ Ahmad Sarwan, *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*, (DU Publishing, 2011), h.36

miskin dan kurang mampu, seorang muslim yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih memiliki kewajiban untuk meysisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahiq). Akan tetapi penyisihan zakat ini hanya diambil dari sebagian kecil harta pemberi zakat (muzakki) dengan disertai kriteria tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan syariat Islam.

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).⁴

Berdasarkan ayat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya membayar zakat merupakan kewajiban sama seperti sholat. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk besar yang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim yang harus ditunaikan bagi yang mampu.

Penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusinya zakat dengan baik. Namun salah satu faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah keputusan para muzaki untuk tidak menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh pada organisasi pengelola zakat yang ada, faktor kepercayaan yang masih rendah pada organisasi tersebut sehingga menyebabkan para muzaki lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mereka yang berhak atau 8 asnaf. Faktor ketidak

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) h.7

percayaan muzaki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan, Akuntabilitas dari pihak BAZ dan LAZ serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut di salurkan melalui BAZ dan LAZ dibandingkan dengan penyaluran secara langsung.

Pengelolaan zakat di Indonesia yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 memaparkan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen tersebut agar potensi zakat menjadi sumber dana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan.⁵

Peran lembaga pengelola zakat di Indonesia belum optimal dengan ditandai adanya permasalahan dalam pengelolaan zakat sehingga kurangnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Terdapat tiga masalah besar yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat. Pertama masalah mengenai kelembagaan, dimana sebagian besar lembaga pengelola zakat masih dikatakan baru mengingat lembaga pengelola zakat berkembang belum lama ini. Lembaga pengelola zakat yang masih baru akan cenderung untuk mencari dan menentukan bentuk dan struktur kelembagaan yang akan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 5.

diterapkan dalam lembaganya. Kedua, masalah mengenai sumber daya manusia (SDM), kualitas sumber daya manusia pengelola zakat masih tergolong rendah karena sebagian besar pengelola zakat tidak menjadikan mengelola zakat sebagai pekerjaan utamanya atau pilihan karir namun sebagai pekerjaan sampingan sehingga pengelola zakat hanya untuk mengisi waktu luang saja. Ketiga, masalah mengenai sistem, masih banyak pengelola zakat yang tidak bisa memahami pentingnya suatu sistem dalam kinerja suatu organisasi.

Lembaga pengelolaan zakat seharusnya lebih amanah dan jelas dalam penyaluran dan transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dana zakat yang telah tersalurkan benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat mempercayakan zakatnya pada lembaga pengelola zakat.

Adanya lembaga pengelola zakat diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai target yang telah ditentukan. Seiring perkembangan zaman, zakat di Indonesia berkembang sangat pesat. Pada tahun 2017 zakat di Indonesia meningkat hingga 20% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 6 triliun yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan dan angka kesadaran umat Islam dalam membayar zakat semakin meningkat.

Tabel 1.1
Data Pengumpulan ZIS Pada Tahun 2016/2017

Instansi	Penghimpunan 2016		Penghimpunan 2017	
	Dana	%	Dana	%
BAZNAS	111,690,914,428	2.23	153,542,103,405	2.47
BAZNAS Provinsi	192,609,000,494	3.84	448,171,189,258	7.20
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,311,745,042,024	66.01	3,426,689,437,619	55.05
LAZ	1,401,248,170,005	27.93	2,195,968,539,189	35.28
Total	5,017,293,126,950	100.00	6,224,371,269,471	100.00

Sumber : Statistik Zakat Nasional 2017⁶

Dalam pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqoh tersebut pada masyarakat perlu adanya proses pencatatan transaksi keuangan hingga menghasilkan Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (accountability) yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan pada stakeholders.

LAZIS Nahdatul Ulama Provinsi Lampung adalah lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah secara nasional yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat pada mustahik.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa setiap lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan setiap dana yang dihimpun, dikelola, maupun yang disalurkan dalam bentuk laporan guna

⁶ Bambang Sudibyo, *Statistik Zakat Nasional 2017*, BAZNAS, 2017, Hal. 4

memenuhi kebutuhan muzakki dan masyarakat umum yang ingin mengetahui laporan keuangan maupun bentuk pertanggungjawaban suatu lembaga.⁷

Tabel 1.2
Data Penghimpunan ZIS pada tahun 2016-2017

No	Tahun	Jumlah
1	Penghimpunan ZIS 2016	Rp. 183.605.000
2	Penghimpunan ZIS 2017	Rp. 132.300.000
	Total	Rp. 315.905.000

sumber : laporan pertanggungjawaban LAZISNU provinsi Lampung⁸

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tahun 2017 mengalami penurunan dalam penghimpunan dana ZIS, namun penurunan ini tidak hanya didapat dari muzakki lama namun kebanyakan dari muzakki yang baru. Hal ini mungkin saja ada kaitannya dengan transparansi laporan keuangannya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah Transparansi dan Akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki yang ada di LAZIS Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.

Penelitian oleh Muh Ashari Assagaf (2016), yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (studi pada BAZNAS Kota Makassar ruang lingkup UPZ Kantor Kementrian Agama Kota Makassar)” menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS kota Makassar.

⁷ Ibid, Pasal 29, h.13

Penelitian mengenai tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat dapat dikatakan masih jarang diteliti. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya referensi peneliti dan sulitnya mendapatkan referensi mengenai kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat pada penelitian terdahulu. Kemudian dikarenakan LAZISNU Provinsi Lampung merupakan lembaga zakat yang belum diaudit oleh KAP, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di LAZISNU Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai **“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung)”**.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung?
2. Apakah akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung?

3. Apakah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.
- c. Untuk mengetahui apakah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengemban ilmu khususnya akuntansi syariah khususnya yang berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas yang berkaitan dengan lembaga zakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi LAZ mengenai tentang gambaran lembaga pengelola zakat yang transparansi dan akuntabel guna untuk meningkatkan kepercayaan muzakki sehingga menarik minatnya untuk menyalurkan zakat, Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan (agency theory)

Istilah *agent* diartikan sebagai : “*a fiduciary relationship by which a party confides to another the management or some business to be transacted in the former’s name or on his account, and by which such other assumes to do the business and render an account of it*”. Hal ini berarti bahwa dalam persekutuan (*partnership*) terdapat dua elemen utama yang untuk mendukung tujuan bisnis yang diinginkan, yaitu dengan adanya dua orang atau lebih yang melaksanakan sesuatu , secara bersama- sama memiliki dan mempunyai tujuan yang sama.

Pihak yang pertama ini dikenal dengan nama pengelola (agent) dan pihak pemilik (principal).⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa agency adalah hubungan antara dua belah pihak dimana pihak agen (pengelola) diberikan ke wenangan untuk mengelola suatu organisasi (perusahaan) oleh pihak principal (pemilik). Jensen dan Meckling mendefinisikn hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih pemilik (principal dalam hal ini adalah pemegang saham) mempekerjakan seseorang (agent) untuk melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan mereka dengan cara mendelegasikan beberapa kebijakan dalam pengambilan keputusan.¹⁰

⁹ Budi Santoso, *Keagenan (agency)* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), h. 2.

¹⁰ Rahmawati, *Teori Akuntansi Keuangan* (Yogyakarta : Graha Ilmu, Edisi 1, cet 1, 2012), h.154.

Keagenan sendiri dapat terjadi melalui beberapa cara yaitu, penetapan, perbuatan, ratifikasi atau disebabkan oleh peraturan hukum.¹¹ Pola hubungan keagenan ini saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan secara jelas tertera dalam kontrak atau perjanjian bisnis untuk memberikan kewenangan dalam transaksi bisnis selama itu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap pekerjaan agen diawasi oleh pihak *principal*.¹²

Pihak *principal* selaku pemilik perusahaan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak *agent* yang dalam hal ini dapat berupa dana dan fasilitas yang dibutuhkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sedangkan *agen* sebagai pihak pengelola suatu perusahaan memunyai kewajiban untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki agar dapat memakmurkan perusahaan dan keuntungan pemegang saham dengan adanya peningkatan nilai perusahaan. *Agen* sebagai pengelola diwajibkan untuk memberikan laporan yang diberikan secara periodik kepada *principal* tentang usaha yang dikelola *agen*. *principal* kemudian akan menilai bagaimana hasil dari kinerja *agen* melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen kepada pemiliknya.¹³

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (

¹¹ Budi Santoso, Keagenan (*agency*) ..., h. 37.

¹² *Ibid*, h. 4

¹³ Rahmawati, *Teori Akuntansi Keuangan*., h. 151.

pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agents-nya pemegang saham.¹⁴

Definisi yang baik untuk menggambarkan hubungan agensi antara pemegang saham (shareholders) dengan agen, adalah definisi yang dibuat oleh Jensen dan Meckling yang mengungkapkan adanya masalah agensi dalam perusahaan yang terpisah antara kepemilikan dan manajemen. Hubungan agensi dapat muncul ketika prinsipal mempercayakan kepada agen untuk melakukan beberapa tindakan dan juga mendelegasi otoritas pengambilan keputusan kepada agen.¹⁵

Teori keagenan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan. Teori ini berfokus pada hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Pemilik perusahaan diistilahkan sebagai principal sedangkan pihak manajemen yang dipercaya untuk mengelola sumber daya disebut agen, agen sebagai pihak yang mengelola

¹⁴ Adrian Sutedi, SH., MH, *Good Corporate Governance*, (Jakarta : Snar Grafika 2011) h.14

¹⁵ Barkah Susanto dan Tiara Ramadhani, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konservatisme*. 201. h.16

perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (The belief revision role). Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (The performance evaluation role).¹⁶

B. Tinjauan Tentang Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan al Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.¹⁷ Zakat menurut terminology (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan didalam Al-Qur'an.¹⁸

Zakat dari segi istilah fikih berarti “seumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.

¹⁶ Ricky Michael Datulagie dan Agus Toni Putra, “ *Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Penggadaian (persero)* “ ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3 Juni 2013, h. 567-575

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2006) h.34

¹⁸ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, 2008) h.3

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nisab (muzakki), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu : fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, gharimin, hamba sahaya dan muallaf. Dari segi bahasa, zakat berarti al-barakatu “keberkahan”, al-nama “pertumbuhan dan perkembangan”, at-taharatu “kesucian”, dan ash-shahalu “keberesan”. Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu pula. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan beres (baik).¹⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah SWT dan beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW.

Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”(Q.S At-Taubah ayat 103)²⁰

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h.9

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) h.162.

Berdasarkan dasar hukum yang dikemukakan di atas adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Hadits Riwayat Jama'ah. "Ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke Negeri Yaman diantara petunjuknya kepada Mu'az adalah : "Beritahukanlah kepada mereka penduduk Yaman "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang fakir di kalangan mereka (penduduk Yaman)".²¹

3. Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut :

- a. Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- c. Memiliki nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Syarat kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat antara lain:

1) Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Harta yang haram baik karena zatnya maupun cara mendapatkannya bukan merupakan objek zakat.

²¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) h.247.

2) Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.²²

3) Berkembang

Menurut ahli fikih, “ harta yang berkembang” secara terminology berarti harta tersebut bertambah tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.

4) Cukup Nisab

Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, Nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu.

5) Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah.

6) Bebas dari Hutang

Dalam menghitung nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya itu.

²² Sri Nurhayati, et al, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h.287.

7) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan ini berada untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.²³

4. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zaka al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum).

Zakat fitrah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah.
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 3) Membersihkan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya idul fitri.²⁴

b. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu. Adapun harta yang wajib dizakati meliputi :

- 1) Binatang ternak, hewan ternak meliputi hewan besar seperti: unta, sapi, dan kerbau sedangkan hewan kecil diantaranya: kambing, dan domba.

²³ Ibid, h.287

²⁴ Abu Arkan Kamil Attaya, *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqoh*, (Bandung : CV. Angkasa, 2013), h.38.

- 2) Emas dan perak, emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu, Islam memandang emas dan perak sebagai harta (potensi) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu di masing-masing Negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpangan uang seperti: tabungan deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut sya'ra atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang (komersil) dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak lainnya, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang tersebut.²⁵
- 3) Harta perniagaan, adalah semua yang diperuntukan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa seperti: alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan

²⁵ Ibid, h.39.

tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan lain-lain.

- 4) Hasil pertanian, adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.
- 5) Madin dan kekayaan laut, adalah hasil tambang yang berada didalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomis seperti: emas, perak timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, amabar, marjan, dan lain-lain.
- 6) Rikaz, adalah harta yang terpendam dari zaman terdahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai miliknya.

5. Infak/ Sedekah

Kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Infaq menurut pengertian umum adalah shorful mal ilal hajah yang artinya mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan.²⁶ Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infaq) di jalan Allah.

²⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, “*Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 tentang akuntansi zakat, Infaq/shadaqah*” (Jakarta : IAI.208), h.2.

Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu.

Sedangkan menurut PSAK No.109 Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan nonzakat. Dan sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.²⁷

Ada dua jenis Infak :

- 1) Infak Wajib, terdiri dari zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu dimasa yang akan datang.
- 2) Infak Sunnah, Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

C. Definisi Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.²⁸ Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholder, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan

²⁷ Ibid, h.2.

²⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat* (Cet.I : Yogyakarta : Idea Press, 2011), h.93.

lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisir.

Sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi selalu disinggung baik dalam pemerintah maupun dalam sebuah tata kelola lembaga.

Menurut Ghambir dikutip dalam Amin Rahmanurrasjid unsur-unsur utama governance yaitu:

- 1) Akuntabilitas,
- 2) Transparansi,
- 3) Keterbukaan,
- 4) Aturan Hukum,
- 5) Kompetensi Manajemen,
- 6) Hak asasi Manusia.²⁹

Secara keuangan Asia Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip dalam Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip Good Financial Governance yaitu: Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- 2) Tersedia Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 3) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Sedangkan, Indikator-indikator transparansi menurut Mardiasmo, yaitu:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.

²⁹ (Amin Rahmanurrasjid, 2008: 71)

- 2) Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat.
- 5) Terdapat system pemberian informasi kepada publik.³⁰

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investigasinya. Pengungkapan masalah yang khusus berhubungan dengan kompleksnya organisasi dari konglomerat. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki utang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko dan pertambahan dari perubahan modal (volatility of capital).³¹

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh muzakki terhadap lembaga. Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong muzakki dalam memilih lembaga zakat.³²

³⁰ Mardiasmo. (2006). "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance". Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 Nomor.1:1-17.

³¹ Adrian Sutedi, SH.,MH, *Good Corporate Governance*, (Jakarta : Sinar Grafika 2011), h.11.

³² Suparno, " Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah" (Universitas Sumatra Utara, 2012), h.12.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Qasas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اُسْتُ جَرَّةٌ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اُسْتُ جَرَّتْ
الْقَوِيُّ اَلْأَمِينُ ٢٦

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"* (QS. Al-Qasas, 28:26)

Konsep transparansi dalam Islam adalah:

- 1) Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki.
- 2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
- 3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.³³

Selain itu, organisasi harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Oleh karena itu merujuk pada teori tersebut untuk penerapan tolak ukur lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi. Transparansi akan menciptakan keterjalinan kepercayaan masyarakat muzakki dengan organisasi pengelola zakat. Dalam islam juga konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran, dalam menyampaikan informasi

³³ Abdussalam Mahmoed Tapanjeh, 2009.

lembaga harus jujur, tidak ada satupun hal yang ditutup-tutupi dari pengetahuan informasi masyarakat dalam hal ini muzakki.³⁴

Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

D. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkenal dalam Administrasi Negara Republik Indonesia menjadi pendorong pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kamus besar bahasa Indonesia akuntabilitas adalah “tentang hal-hal yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa diminta pertanggungjawabannya”.³⁵

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban”.³⁶

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, karena apapun yang telah dititipkan kepada

³⁴ Rezky Khaerani, 2013. h.31

³⁵ Ahmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pemhela Wakaf* (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010), h.23-24.

³⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Cet. I : Yogyakarta : Andi, 2002), h.27.

manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan atau perbuat. Sebagaimana dalam firman Allah (Q.S Al-mudassir : 38)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨

Artinya : *Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S Al-Mudassir: 38).*³⁷

Dan diperkuat dalam firman Allah (Q.S An nisa : 58)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat (Q.S An-Nisa:58).*³⁸

Menurut Mahmud sebagaimana dikutip oleh Maisyah Kholmi ayat diatas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu: Pertama, memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia. Kedua, memberikan keputusan hukum antara manusia dengan adil atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta

³⁷ Al-Quran dan Terjemahannya Al-Hikmah (Bandung : CV Diponegoro, 2014), h.576.

³⁸ Al-Quran dan Terjemahannya Al-Hikmah (Bandung : CV Diponegoro, 2014), h.87.

menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak.

Oleh karena itu menurut pandangan Masiyah Kholmi konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat manusia maupu alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan.³⁹

Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

1. Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.⁴⁰

Akuntabilitas harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan pemberi amanah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai syariat islam, zakat disalurkan kepada asnaf sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an.⁴¹

³⁹ Masiyah Kholmi, “ *Akuntabilitas dan Peembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam* ” : Jurnal Studi Ekonomi Islam, (Universitas Muhammadiyah Malang. Volume 15 no.1 :2012), h.65.

⁴⁰ (Abdussalam Mahmoed Abu Tapanjeh, 2009)

⁴¹ Kementrian Dalam Negeri “ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* ” .Official Website.www.Kemendagri.co.id., (20 februari 2019).

Akuntabilitas akan mengurai rasa tidak percaya masyarakat yang berada diluar manajemen dalam hal ini adalah muzakki. Sehingga dengan adanya akuntabilitas mampu memberikan dampak baik para muzakki terhadap objek (lembaga), maka akan berpengaruh pula pada minat para muzakki untuk berzakat (menentukan pilihan) pada lembaga zakat.

E. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan Keuangan adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi yang berisi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisis keuangan, dan laporan arus kas. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau accountability. Dan juga dapat menggambarkan indicator kesuksesan suatu perusahaan atau lembaga dalam mencapai tujuannya.⁴²

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran atau progress report secara periodik. Karena itu, laporan keuangan mempunyai sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan sebagai progres report terdiri atas data yang merupaka hasil kombinasi antara fakta yangtelah di catat (recorded fact), prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan personal judgement.⁴³

⁴² Drs. Sofyan Syarif Harahap, MS Ac, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h.7.

⁴³ Irham Fahmi “*Analisis Laporan Keuangan*”(Bandung: ALFABETA, 2015), h. 3

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah ke dalam konteks yang memberikan makna.⁴⁴

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak dalam perusahaan, tetapi juga bagi pihak lainnya. Pemakai laporan keuangan meliputi investor saat ini dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lain, pelanggan, pemerintah dan lembaga-lembaga, dan masyarakat. Sejumlah pemakai laporan ini menggunakannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Terdapat beberapa karakteristik pokok yaitu:⁴⁵

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami

⁴⁴ Paul Lillrank, "The Quality of Information", *Internasional Journal of Quality & Reliability Management* Vol. 20 No 6 (Juni 2003), h. 691 – 703.

⁴⁵ Srinurhayati, Wasilah "Akuntansi syariah di Indonesia " Edisi Revisi, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 96

olehpemakai. Maksudnya, pemakai diamsusikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untukmemenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masalalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Andal dapat diartikan sebagai bebeas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakai sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

a. Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan denganjujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atauyang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka

peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha yang menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatannya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

e. Kelengkapan

Informasi dalam laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar satu periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Dalam pengertian yang sederhana, Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan atau lembaga pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.⁴⁶

Bedasarkan PSAK 109 bahwa komponen laporan keuangan yang lengkap dari lembaga amil zakat terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan dana. Untuk penyajian aset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya, namun istilah modal diganti dengan “dana”.

b. Laporan Perubahan Dana

⁴⁶ Dr. Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h.7.

Laporan Perubahan Dana menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana nonhalal serta penerimaan dan penggunaan dana amil.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan ini menyajikan pengelolaan aset dari dana infak / sedekah. Dana zakat peruntukannya secara syariah telah diatur secara jelas, sedangkan untuk dana infak/sedekah penyalurannya fleksibel, tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola dulu oleh lembaga pengelola agar dana tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

d. Laporan Arus Kas.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan.⁴⁷

Laporan keuangan juga memaparkan pertanggungjawaban pengelola perusahaan atas setiap tugas yang dipercayakan. Berikut ini, beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

⁴⁷ Pernyataan Standar Akuntansi KEuangan No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqah.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakki maupun calon muzakki. Sehingga keyakinan dan kepercayaan muzakki terhadap citra lembaga tetap terjaga. Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahiq dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.⁴⁸

F. Kepercayaan Muzakki

Muzakki merupakan orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang atau badan yang menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat yaitu

⁴⁸ Dr. Kasmir, S. E., M.M. Pengantar manajemen keuangan. (jakarta : Prenamedia Grup , 2010). h. 87.

ada delapan golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fissanillillah, dan ibnu sabil.

Kepercayaan konsumen/muzakki adalah pengetahuan dan kesimpulan seorang konsumen tentang suatu obyek, atribut, dan manfaatnya. Obyek nya yaitu bisa berupa sebuah produk seperti barang, manusia, perusahaan, dan segala sesuatu dimana seseorang akan memiliki kepercayaan dan sikap.

Maka didalam penelitian ini, kepercayaan Afektif dan Kognitif terhadap lembaga zakat didefinisikan sebagai rasa percaya *muzakki* berupa emosi dan pengetahuan terhadap suatu lembaga zakat dalam mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq, karena muzakki telah percaya/menganggap bahwa lembaga sudah jujur, transparan dan profesional dalam mengelola zakat. Sehingga muzakki akan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak kerabat, teman, dll. untuk berzakat di lembaga amil zakat daripada harus secara langsung memberikan nya kepada *mustahiq*. Karena akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang lebih terhadap lembaga amil zakat dan dana zakat yang telah terkumpul akan lebih optimal dalam pendistribusian kepada mustahiq.

Literatur tentang kepercayaan menyarankan, bahwa keyakinan pada pihak yang mendapat kepercayaan adalah reliabel dan integritas tinggi, disertai dengan kualitas yang konsisten, kompeten, jujur, bertanggungjawab dan baik. Kepercayaan konsumen tidak hadir begitu saja, tetapi dari proses yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. Dalam proses terbentuknya kepercayaan konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti,

reputasi organisasi, besar atau kecilnya organisasi, saling menyenangkan antara konsumen dengan organisasi maupun antara konsumen dengan karyawan organisasi.⁴⁹

Kepuasan konsumen terhadap nilai pelayanan dan organisasi menuntun mereka untuk komitmen dan loyal kepada organisasi tersebut. Ketika kepercayaan konsumen kepada produk atau jasa telah terbentuk konsistensi kualitas produk dan jasa, maka akan berdampak kepada komitmen dan loyalitas. Menurut Rambat dan Hamdhani, kepercayaan adalah hal penting bagi konsumen, karena kebanyakan konsumen akan mengutamakan untuk tetap menjadi konsumen suatu organisasi, ketika mereka telah percaya kepada organisasi tersebut.⁵⁰

G. Akuntansi Zakat

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.⁵¹

Secara umum akuntansi adalah suatu system informasi yang digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan,

⁴⁹ Donney Patricia M and Joseph P. Canon Dalam Sri Fadilah, et all, 2012.

⁵⁰ Rambat, Lupiyodi dan A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, (Cet.II; Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.175

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.33.

mengomunikasikan peristiwa ekonomi organisasi kepada pemakai informasinya.⁵²

Sedangkan yang dimaksud dengan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan, dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.⁵³

Standar akuntansi merupakan sebuah kunci sukses bagi Organisasi Pengelola Zakat dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga laporan OPZ harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dan dapat dipercaya, dan relevan bagi penggunaanya, namun tetap dalam konteks syariah islam. Akuntabilitass OPZ ditujukan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut.⁵⁴

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk: pertama memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi. Kedua memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam

⁵² Samryn, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.3.

⁵³ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h.29.

⁵⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wtanwil*, (Cet 1: Yogyakarta: UII Press. 2004), h.225..

mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, shadaqah yang menjadi wewenanganya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada public (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana public (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Pada akhir 2011, PSAK 109 tentang akuntansi dan infaq/sedekah telah resmi disahkan oleh IAI bekerja sama dengan FOZ. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) ini mengacu pada ruang lingkup untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. PSAK No.109 (Revisi 2010) ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut :

- a. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.
- b. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara memperolehnya.
- c. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik

berada didalam pengelolaan sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.

- d. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran.⁵⁵

Adapun karakteristik dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010), antara lain sebagai berikut :

- a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
- b. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan oleh pemberi infak/sedekah.
- c. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

PSAK tersebut menyebutkan bahwa komponen laporan keuangan sebuah OPZ terdiri atas:

- a. Laporan Perubahan Dana.
- b. Neraca (laporan posisi keuangan).
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan.
- d. Laporan Arus Kas.

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 342.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

PSAK 109 juga mengatur mengenai pengungkapan-pengungkapan terkait dana zakat dan infaq/sedekah yang harus mengatur dilaporkan oleh sebuah OPZ dalam laporan keuangannya. Hal itu berupa :

1. Kebijakan penyaluran zakat infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq non amil.
2. Kebijakan penyaluran zakat dan infaq/sedekah untuk amil dan mustahiq non amil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat dan infaq/sedekah berupa asset non kas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq.
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
6. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode

pelaporan serta alasannya. Selain itu juga diungkapkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut secara terpisah.⁵⁶

7. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terkait dan tidak terkait.
8. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq
 - a. Sifat hubungan.
 - b. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan.
 - c. Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.
9. Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
10. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah.⁵⁷

H. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis

⁵⁶ Pernyataan Standar Akuntansi KEuangan No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqah.

⁵⁷ Pernyataan Standar Akuntansi KEuangan No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqah.

organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan Organsasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah islam. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam AL-Qur'an dan hadist.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
3. Biasanya memiliki dewan pengawas syari'ah dalam struktur organisasinya.

Badan amil dibentuk dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, Badan Amil Zakat pada awalnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah). Pengeertian BAZIS ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991 tentang Badan Amil Zakat, infak dan sedekah. Dalam pasal 1 Surat Keputusan Bersama (SKB) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang

mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak/sedekah secara berdaya guna berhasil guna.⁵⁸

Pengertian Badan Amil Zakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999. Dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Unsur pemerintah dalam kepengurusan BAZ adalah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah. Sedangkan, unsur masyarakat mencakup tokoh masyarakat, ulama, cendikiawan, dan sebagainya.

I. Penelitian Terdahulu

Pada literatur ini, penulis mencantumkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sebagai rujukan dalam mengembangkan materi yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian oleh Arim Nassim dan Muhammad Rizqi Syahri Romadhon (2014), yang berjudul “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan,

⁵⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelola yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hal.41.

Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (studi pada LAZ di kota Bandung)” menunjukkan hasil bahwa Transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amal zakat. Ketika kualitas transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola semakin baik maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amal zakat juga meningkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Arim Nassim dan Muhammad Rizqi Syahri Romadhon adalah pada variable dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian pada satu lembaga amal zakat yaitu LAZIS Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.⁵⁹

2. Penelitian oleh Dina Fitrisia Septriani (2011) , yang berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya” menunjukkan hasil bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif terhadap pengumpulan Dana ZIS Pada LAZ di Surabaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dina Fitrisia Septriani adalah penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki yang ada di LAZIS Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.⁶⁰

⁵⁹ Arim Nassim, Muhammad Rizqi Syahri Romadhon, *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (studi pada LAZ di kota Bandung)*, jurnal: riset akuntansi dan keuangan, 2014.

⁶⁰ Dina Fitrisia Septriani, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya*. Jurnal akuntansi, 2011.

3. Penelitian oleh Rifqi Muhammad (2006), yang berjudul “Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta” menunjukkan hasil bahwa pertama, semua lembaga telah membuat akuntabilitas keuangan tetapi dalam model yang berbeda berdasarkan karakteristik lembaga. Kedua, hampir lembaga diamati tidak memiliki system akuntansi yang baik dan pengendalian internal. Ketiga, semua lembaga diamati memiliki masalah yang sama tidak memiliki standar akuntansi dalam pengolahan akuntabilitas keuangan dan kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola divisi keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rifqi Muhammad adalah sampel penelitian, pada penelitian ini penulis mengambil sampel muzakki pada satu lembaga amil zakat.⁶¹
4. Penelitian oleh Muh Ashari Assagaf (2016), yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (studi pada BAZNAS Kota Makassar ruang lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar)” menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS kota Makassar.⁶²

⁶¹ Rifqi Muhammad, Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal akuntansi dan investasi, vol 7 no 1, 2006.

⁶² Muh Ashari Assagaf, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (studi pada BAZNAS Kota Makassar ruang lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar). Skripsi Ekonomi Universitas UIN Alaudin Makassar, 2016.

5. Penelitian oleh (Nurritziana et al., 2017) dengan judul “Determinan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders” menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pemangku kepentingan publik.
6. Penelitian oleh (Nadlifah, 2015) dengan judul “Pengaruh transparansi dan tanggung jawab (responsibility) terhadap kepatuhan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Malang (Skripsi Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)”. Menguji pengaruh transparansi dan tanggung jawab terhadap kepatuhan membayar zakat di lembaga Zakat Kota Malang. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai t hitung transparansi bernilai 2.384 dengan nilai signifikansi 0.18 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat di lembaga zakat.
7. Penelitian oleh (Rouf, 2011) dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang bertujuan menguji pengaruh kepercayaan, religiusitas dan pendapatan terhadap minat masyarakat bayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang”. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap minat masyarakat bayar zakat di Rumah Zakat.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah pada variable yang digunakan ,peneliti hanya menggunakan dua variable independen yaitu transparansi dan akuntabilitas, dan hanya satu variabel dependen yaitu kepercayaan muzakki. Kemudian dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada satu lembaga amil zakat, yaitu LAZISNU Provinsi Lampung.

J. Kerangka Berpikir

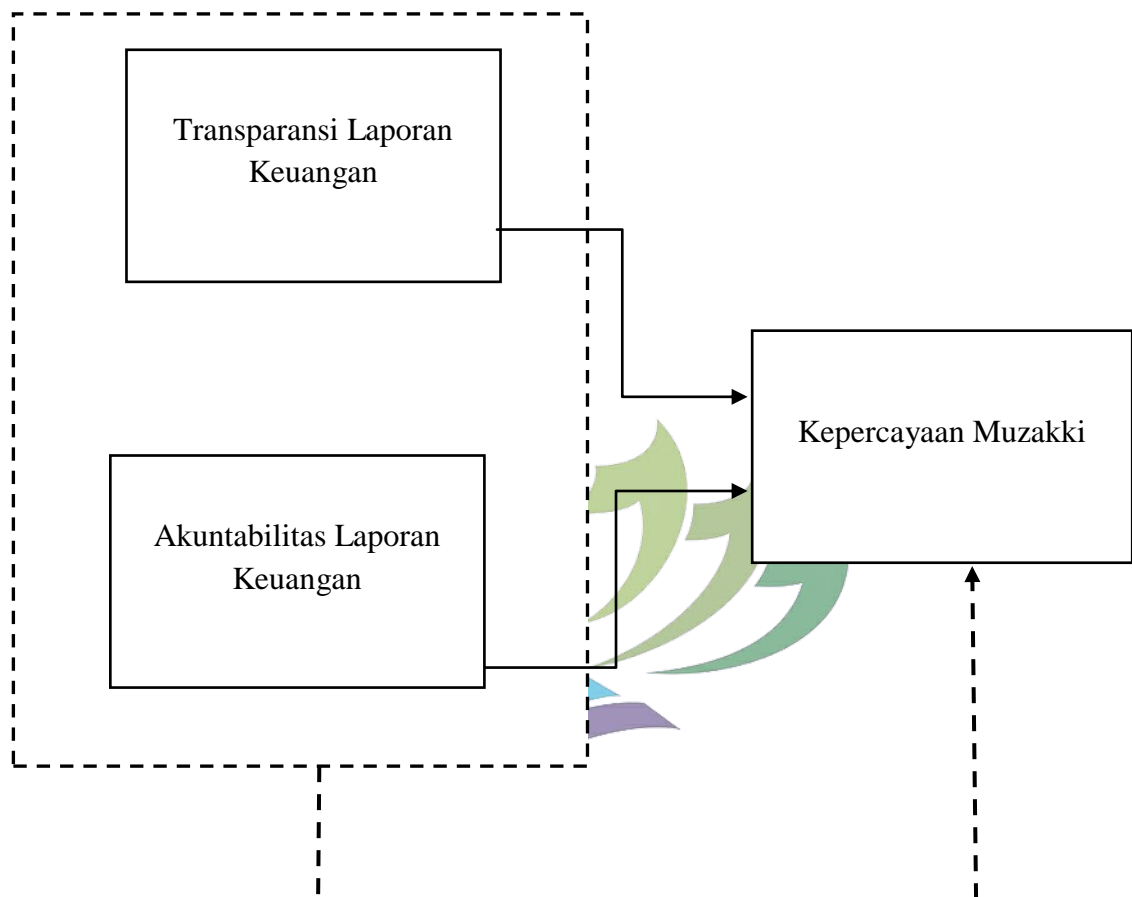
Lembaga Amil zakat, infaq, shodaqoh kini tak dapat lagi menganggap remeh soal pertanggungjawaban public atas dana yang diserahkan donator. Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah lembaga public. Masyarakat merasa perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Apakah sumber daya yang mereka serahkan telah digunakan secara benar atau tidak.

Manajemen suatu Badan Amil Zakat dan Lembaga Pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh harus dapat diukur. Untuk itulah suatu lembaga amil zakat haruslah memenuhi 3 syarat , yaitu amanah, Proffesional dan transparan. Dengan transparansinya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu system control yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisir.

Pada kerangka berfikir dijelaskan secara logis hubungan antar variable yang saling berkaitan dalam penelitian. Maka model kerangka berfikir

digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan berbagai factor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶³

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.283.

K. Hipotesis

1. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Muzakki

Transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal-balik antara lembaga pengelolaan zakat dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan memperoleh akses informasi yang terkait dengan lembaga pengelolaan zakat, sehingga semakin terbuka suatu lembaga atau perusahaan maka semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Arim Nassim dan Muhammad Rizqi Syahri Romadhon (2014), menunjukkan hasil bahwa Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat. Penelitian oleh Dina Fitrisia Septriani (2011) menunjukkan hasil bahwa transparansi memberikan pengaruh yang positif terhadap pengumpulan dana ZIZ pada LAZ di Surabaya. kemudian penelitian oleh Muh Ashari Assagaf (2016) menunjukkan hasil bahwa transparansi pengelolaan zakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAZ kota Makasar. Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki

2. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Muzakki

Lembaga pengelolaan zakat harus adil dan bertanggung jawab akan segala aktivitasnya dalam mengelola zakat. Sehingga mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang akan membayarkan/menyalurkan zakatnya pada lembaga zakat tersebut. Akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Teori atribusi relevan dengan akuntabilitas lembaga zakat, karena pengetahuan muzakki tentang kinerja lembaga zakat merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ashari Assagaf (2016), menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS kota Makassar. Penelitian oleh Dina Fitriasia Septriani (2011) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh yang positif terhadap pengumpulan dana ZIZ pada LAZ di Surabaya. Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H2 : Akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki

3. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Muzakki

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah lembaga public. Masyarakat merasa perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Apakah sumber daya yang mereka serahkan telah digunakan secara benar atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ashari Assagaf (2016), menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS kota Makassar. Kemudian penelitian oleh Mohammad Fahmi Ikhwandha (2018) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H3: Transparansi dan Akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Arkan Kamil Attaya, *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqoh*, Bandung, CV. Angkasa, 2013.
- Adrian Sutedi, SH., MH, *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011 .
- Adrian Sutedi, SH.,MH, *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Ahmad Sarwan, *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*, DU Publishing, 2011. .
- Arim Nassim, Muhammad Rizqi Syahri Romadhon, *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (studi pada LAZ di kota Bandung)*, jurnal: riset akuntansi dan keuangan, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bambang Sudibyo, *Statistik Zakat Nasional 2017*, BAZNAS, 2017, 4.
- Budi Santoso, *Keagenan (agency)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Dina Fitrisia Septriani, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya*. Jurnal akuntansi, 2011.
- Dr. Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Dr. Kasmir, S.E., M.M. Pengantar manajemen keuangan, Jakarta Prenamedia Grup , 2010.
- Drs. Sofyan Syarif Harahap, MS. Ac, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, Jakarta Bumi Aksara, 2002.
- Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta, Qultum Media, 2008.
- Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Progressif, 2004.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 tentang akuntansi zakat, Infaq/shadaqah*, Jakarta, IAI.2008.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*, Semarang , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.

- Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung, Alfabeta, 2015.
- Kementrian Dalam Negeri, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Official Website. www.Kemendagri.co.id, 20 februari 2019.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Cet.I, Yogyakarta, Andi, 2002.
- Masiyah Kholmi, *Akuntabilitas dan Peembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Studi Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Volume 15 no.1, 2012.
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Cet.I, Yogyakarta, Idea Press, 2011.
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelola yang Efektif*, Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wtanwil*, Cet 1, Yogyakarta, UII Press. 2004.
- Paul Lillrank, *The Quality of Information*, *Internasional Journal of Quality & Reliability Management*, Vol. 20 No 6 Juni 2003.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 tentang *Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqah*.
- Rahmawati, *Teori Akuntansi Keuangan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Edisi 1, cet 1, 2012.
- Rambat, Lupiyodi, A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Cet.II, Jakarta, Salemba Empat, 2008.
- Ricky Michael Datulagie, Agus Toni Putra, *Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Penggadaian (persero)* ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3 Juni 2013.
- Rifqi Muhammad, *Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal akuntansi dan investasi, vol 7 no 1, 2006.
- Samryn, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2015.
- Srinurhayati, Wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-16, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2018.

- Suparno, *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Universitas Sumatra Utara, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 5.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.



